

**IMPLEMENTASI PROGRAM SIDOARJO BERSIH DAN HIJAU  
YANG TERTUANG DALAM SURAT KEPUTUSAN BUPATI  
NO 188 TENTANG TIM SIDOARJO BERSIH DAN HIJAU  
(Studi pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo)**

**Ruddy Oktarino Zakaria, Mochammad Makmur, Mochammad Rozikin**  
Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang  
E-mail: Ruddy\_oktarino@yahoo.com

**Abstract:** *Implementation Program Sidoarjo Clean and Green in Regent Decree No 188 about Sidoarjo Clean and Green Team (Study at Cleanliness and landscaping offices). The result of this research show that has implementation program Sidoarjo clean and green, but not maximum. That is see from program Sidoarjo clean and green can not reduce the amount of waste in Sidoarjo city. Since of 2010 – 2012 increasing the amount of waste volume. Since 2010 as 4.694.299,6, 2011 as 4.872.650 an than 2012 as 4.970.104. Impact positive from Sidoarjo clean and green can provide new skills and knowledge on how to manage waste be economically valuable goods and rewarding. In implement program Sidoarjo clean and green, be found disadvantage factor. Disadvantage factor impelement program Sidoarjo clean and green there are lack good synergy between relevant government agencies, lack of public awareness with environment, lack of witness for the people who throw litter and the high level of urbanization in Sidoarjo city.*

**Keywords:** *implementation, implementation program, Sidoarjo Clean and green*

**Abstrak:** **Implementasi Program Sidoarjo Bersih Dan Hijau Yang Tertuang Dalam Surat Keputusan Bupati No 188 Tentang Tim Sidoarjo Bersih Dan Hijau (Studi Pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo).** Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program SBH telah diimplementasikan di Kabupaten Sidoarjo, namun hasilnya masih belum maksimal. hal tersebut terbukti bahwa program SBH belum mampu mengurangi jumlah volume sampah di Kabupaten Sidoarjo. Sejak tahun 2010 – 2012 jumlah volume sampah terus meningkat. Tahun 2010 jumlah volume sampah sebesar 4.694.299,6, tahun 2011 sebesar 4.872.650 sedangkan pada tahun 2012 sebesar 4.970.104. Dampak positif dari implementasi program SBH adalah memberikan keterampilan dan pengetahuan baru kepada masyarakat Kabupaten Sidoarjo dalam mengelola sampah menjadi barang yang bernilai ekonomis dan bermanfaat. Dalam implementasi program SBH juga tidak terlepas dari faktor penghambat. Faktor penghambat implementasi program SBH ialah tidak adanya sinergi yang baik antara DKP dan dinas – dinas terkait, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan, tidak adanya sanksi yang tegas bagi masyarakat yang membuang sampah di sembarang tempat dan tingginya tingkat urbanisasi di Kabupaten Sidoarjo.

**Kata kunci:** impelementasi, implementasi program, Sidoarjo Bersih dan Hijau

---

### **Pendahuluan**

Di Indonesia, masalah kebersihan selalu menjadi polemik yang berkembang. Kasus-kasus yang menyangkut masalah kebersihan setiap tahunnya selalu meningkat. Dan sampah adalah salah satu faktor penyebab kurangnya masalah kebersihan. Sidoarjo saat ini telah menjadi kawasan *urban* (perkotaan), yang merupakan kawasan industri dan padat penduduk. Imbasnya, saat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo hanya mampu menangani 20% dari total sampah yang dihasilkan setiap harinya. Apalagi di Sidoarjo hanya ada satu Tempat Pembuangan

Akhir (TPA), yang berlokasi di Kecamatan Jabon, tepat di sisi sebelah timur area semburan lumpur Lapindo atau sebutan versi pemerintah yaitu Lumpur Sidoarjo. Meski saat ini Pemkab Sidoarjo telah merencanakan TPA tambahan dengan sistem *sanitary landfill*, bekerja sama dengan pemerintah Jerman, realisasinya masih membutuhkan persiapan dan waktu yang tidak singkat. Apalagi penambahan TPA jelas bukan solusi jangka panjang (Zuhri, 2013).

Permasalahan sampah di wilayah Kabupaten Sidoarjo menjadi perhatian khusus

Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kabupaten Sidoarjo. Bachrul Amig, Kepala DKP Kabupaten Sidoarjo mengatakan bahwa permasalahan sampah di wilayah Kabupaten Sidoarjo merupakan tanggung jawab semua pihak. Untuk itu perlu melakukan koordinasi kepada semua pemangku kepentingan dari mulai Rt, Rw, Kepala Desa dan Camat. Maka dari itu DKP Kabupaten Sidoarjo akan segera mengajak bicara kepada semua pemangku kepentingan terkait permasalahan sampah terutama yang dibuang ke sungai-sungai, sehingga menyebabkan sungai tersumbat dan banjir. Sebagai langkah awal untuk mengatasi permasalahan sampah itu, pihaknya masih melakukan pengangkatan dan pengangkutan sampah dari sungai ke tempat pembuangan sampah (Berita Sidoarjo, 2013).

Dari berbagai permasalahan tersebut, maka pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengharapkan peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat sangat penting dalam meningkatkan daya guna dan hasil guna sistem pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Program SBH (Sidoarjo Bersih dan Hijau), merupakan bentuk tanggungjawab pemerintah terhadap masyarakat. Pemerintah tidak hanya sebagai fasilitator tetapi juga sebagai motivator untuk menumbuhkembangkan perilaku masyarakat agar peduli dengan lingkungannya. Dalam program SBH ini masyarakat akan diberikan pengetahuan tentang bagaimana pengelolaan sampah agar sampah rumah tangga tidak hanya dibuang begitu saja, melainkan dapat dimanfaatkan menjadi barang ekonomis atau dapat dijual. Khusus sampah organik dapat dimanfaatkan atau diolah sebagai pupuk sedangkan sampah an organik dapat dimanfaatkan sebagai kerajinan. Dengan adanya program SBH inilah, diharapkan dapat mengatasi masalah sampah di Kabupaten Sidoarjo.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan masalah adalah Bagaimana implementasi Program SBH dan apa saja faktor pendukung dan penghambat dari implementasi Program SBH tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Program SBH dan faktor pendukung serta penghambat dari Program SBH.

## **Tinjauan Pustaka**

### **A. Kebijakan Publik dalam Administrasi Publik.**

Lembaga Administrasi negara dalam Sjamisjar (2006, h.118) mendefinisikan administrasi publik adalah administrasi mengenai

negara dalam keseluruhan arti, unsur dimensi dan dinamikanya. Dalam situasi dan kondisi negara bagaimanapun, administrasi Negara harus tetap berperan memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan negara, mengemban tugas penyelenggaraan negara, mengemban misi perjuangan bangsa dalam bernegara, memberikan pelayanan dan perhatian sebaik-baiknya kepada masyarakat, dan membuka peluang kepada masyarakat untuk berkarya dalam upaya mencapai tujuan bersama dalam bernegara ataupun untuk melakukan peran tertentu dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik yang secara tradisional dilakukan oleh aparatur negara.

Di dalam administrasi publik, terdapat suatu kebijakan yang merupakan hasil dari pengelolaan teori pemerintah sehingga dapat diimplementasikan oleh masyarakat. Kebijakan tersebut merupakan kebijakan publik, yang mana setiap keputusan yang dibuat tujuannya adalah untuk kepentingan publik.

Kebijakan publik, dilihat dari perspektif Instrumental, adalah alat untuk mencapai suatu tujuan yang berkaitan dengan upaya pemerintah mewujudkan nilai-nilai kepublikan (*public values*). Nilai-nilai kepublikan sebagai tujuan kebijakan tersebut dapat memiliki wujud bermacam-macam. Namun demikian, menurut Purwanto (2012, h.64) pengertian umum kebijakan publik adalah alat untuk mewujudkan nilai-nilai yang diidealkan masyarakat seperti keadilan, persamaan, dan keterbukaan, seperti memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat misalnya: masalah kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, dan pelayanan publik yang buruk. Memanfaatkan peluang baru bagi kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat seperti mendorong investasi, inovasi pelayanan, dan peningkatan ekspor, untuk melindungi masyarakat dari praktek swasta yang merugikan misalnya pembuatan undang-undang perlindungan konsumen, ijin trayek, ijin gangguan dan lain-lain.

### **B. Implementasi Program SBH**

Suatu kebijakan tidak akan tercapai dengan sendirinya tanpa kebijakan tersebut diimplementasikan. Implementasi menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah sama dengan pelaksanaan. Implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Dalam kaitan ini, seperti yang dikemukakan oleh Ujodi dalam Wahab Solichin (1990, h.51) yang menyatakan bahwa, Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang terpenting, bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijaksanaan.

Kebijaksanaan-kebijaksanaan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.

Tahapan implementasi merupakan proses untuk mewujudkan tujuan kebijakan sering disebut sebagai tahap yang penting (*critical stage*). Disebut penting karena tahapan ini merupakan “jembatan” antara dunia konsep dengan dunia realita seperti Grindle dalam purwanto (2012, h.65) yang menyebut bahwa implementasi “*establish a link that allows goals of public policies to be realized as outcomes of governmental activity*”. Dunia konsep yang dimaksud di sini tercermin dalam kondisi ideal, sesuatu yang dicita-citakan untuk diwujudkan sebagaimana terformulasikan dalam dokumen kebijakan. Sementara dunia nyata adalah realitas dimana masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan sedang bergelut dengan berbagai persoalan sosial, ekonomi dan politik.

### C. Lingkungan Hidup

Menurut Undang – Undang RI No. 4 tahun 1982, tentang ketentuan-ketentuan pokok Pengelolaan lingkungan hidup dan Undang-Undang RI No 23 tahun 1997 tentang Pengolahan Lingkungan Hidup, dikatakan bahwa Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Berdasarkan pengertian lingkungan hidup menurut undang-undang dapat disimpulkan bahwa lingkungan hidup merupakan lingkungan yang terdiri dari lingkungan alam, buatan dan sosial yang saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, sebagai makhluk sosial wajib untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup dengan cara melakukan pengelolaan lingkungan.

Gerakan lingkungan hidup di Indonesia telah dimulai pada tahun 1960-an. Sebuah tonggak sejarah gerakan ini ialah diselenggarakannya Seminar Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pembangunan Nasional oleh Universitas Padjadjaran dalam bulan Mei 1972, sebulan sebelum Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup di Stokholm. Tonggak sejarah lain adalah diangkatnya seorang Menteri Negara Lingkungan Hidup pada tahun 1987. Dengan pengangkatan ini Lingkungan Hidup merupakan bagian resmi kebijakan pemerintah. Dengan masuknya lingkungan hidup sebagai bagian kebijakan pemerintah, pembangunan ekonomi diisyaratkan untuk berwawasan lingkungan dengan tujuan untuk menghasilkan

pembangunan berkelanjutan, yaitu pembangunan berkesinambungan yang tidak mengalami keambrokan karena rusaknya lingkungan hidup.

SBH (Sidoarjo Bersih dan Hijau) merupakan sebuah program yang dirancang oleh pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2008 dan mulai aktif pada tahun 2010 sebagai salah satu cara mengatasi permasalahan lingkungan yang ada khususnya di Kabupaten Sidoarjo. Tujuan dari program SBH adalah untuk menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat agar peduli terhadap lingkungan di sekitarnya dan merubah perilaku masyarakat yang tak peduli kepada lingkungan dengan setidaknya tidak membuang sampah disembarang tempat. Masyarakat Sidoarjo melalui program SBH ini dituntut untuk ikut aktif dalam menjaga lingkungan dengan setidaknya memahami bagaimana mengelola sampah dan memilah sampah rumah tangga sehingga tidak semua sampah terbuang sia-sia, karena ada sampah yang dapat dioalah kembali menjadi sesuatu yang bermanfaat dan bernilai ekonomis.

### D. Sampah

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Selanjutnya yang dimaksud dengan sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.

Menurut Undang-undang No. 18 Tahun 2008 pengelolaan sampah didefinisikan sebagai kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Kegiatan pengurangan meliputi Pembatasan timbulan sampah, Pendaauran ulang sampah, dan atau, pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan kegiatan penanganan meliputi Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan akhir sampah.

Beberapa kendala di dalam pengelolaan sampah adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah, dan kurangnya sarana yang disediakan dalam proses pengelolaan sampah. Dengan adanya kendala tersebut, oleh karena sampai saat ini masih banyak sampah yang tertimbun di pinggir-pinggir sungai sehingga kerap kali menimbulkan banjir, dan masih banyaknya timbunan sampah di TPA yang belum mampu dikelola secara baik dan benar oleh pemerintah.

### Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Azwar (2007, h.7) penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan fakta dan karakteristik secara sistematis dan akurat mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu.

Menurut pada permasalahan yang diangkat, penelitian ini berusaha untuk mengetahui dan mengidentifikasi tentang program Sidoarjo Bersih dan Hijau (SBH), serta untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam menerapkan program Sidoarjo Bersih dan Hijau.

Fokus dalam penelitian ini adalah: (1) implementasi Program SBH di Kabupaten Sidoarjo yang meliputi regulasi, sosialisasi, sumberdaya, disposisi, program kegiatan dan outcomes. (2) kendala-kendala dalam menerapkan Program SBH.

Lokasi dan situs penelitian ini di Kabupaten Sidoarjo, tepatnya di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder berupa data Laporan yang diperoleh dari DKP, buku pedoman pengelolaan sampah yang diperoleh peneliti pada saat melakukan wawancara. Instrumen penelitian ada pedoman observasi, peneliti sendiri, pedoman wawancara, dan dokumen.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif yang dikembangkan oleh Miles & Huberman (1992, h.20) yang terdiri dari tiga komponen analisis yaitu, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## **Pembahasan**

### **1. Implementasi Program SBH**

#### **a. Regulasi**

Regulasi merupakan payung hukum yang mana suatu kebijakan atau program dapat dijalankan karena adanya regulasi atau kekuatan hukum legal formal. Program SBH berawal dari visi dan misi Kabupaten Sidoarjo tepatnya pada misi nomor tujuh yang berbunyi meningkatkan kualitas dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Regulasi mengenai masalah lingkungan dan pengelolaan sampah, juga tertuang dalam peraturan-peraturan berikut ini: UU No 18 tahun 2008 tentang pengelolaan lingkungan hidup, Peraturan Menteri dalam Negeri No 33 tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan sampah,

Peraturan Pekerjaan Umum No 21/Prt/M/2006, tentang kebijakan dan strategi Nasional pengelolaan sistem dan persampahan., Peraturan daerah Prov.Jawa Timur No 4 Tahun 2010, tentang pengelolaan sampah regional., Peraturan Daerah Sidoarjo :SNI 03/3242/1994, tentang pengelolaan sampah di pemukiman,

Sesuai dengan payung hukum tersebut, maka pemerintah kabupaten Sidoarjo berupaya membuat program untuk mengatasi masalah lingkungan khususnya masalah sampah. Program tersebut adalah program Sidoarjo Bersih dan Hijau (SBH) yang tertuang dalam SK Bupati No 188 Tentang Tim Sidoarjo Bersih dan Hijau.

#### **b. Sosialisasi**

Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam mengimplementasikan program SBH dilakukan dengan caraLaunching program SBH sebagai langkah awal pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam memperkenalkan kegiatan dari program SBH, pemasangan baliho di pinggir jalan raya Kabupaten Sidoarjo dan pembagian sticker guna mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam implementasi program SBH serta kaderisasi program SBH, guna memberikan informasi dan membimbing masyarakat tentang berbagai kegiatan yang menyangkut implementasi program SBH.

Pelaksanaan sosialisasi program SBH Kabupaten Sidoarjo sangat penting bagi masyarakat, mengingat substansi didalamnya merupakan refleksi beragam insentif dan disinsentif pemerintah daerah dalam mewujudkan Kabupaten Sidoarjo yang bersih, nyaman dan teduh.

#### **c. Sumber Daya**

Sumber daya implementasi program SBH terdiri dari (1) sumber daya manusia seperti pemerintah terkait yakni Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP), Badan Lingkungan Hidup (BLH), dan Dinas Kesehatan (DINKES). Masyarakat kabupaten Sidoarjo serta kader sebagai pembimbing masyarakat secara langsung dalam mengimplementasikan program SBH (2) sarana dan prasarana yang mendukung implementasi program SBH yang telah disediakan oleh Pemkab Sidoarjo, seperti dalam tabel berikut ini :

**Tabel1: Sarana dan Prasarana Program SBH**

no	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Keterangan
	Sapu lidi	1.485	Cukup baik
	Keranjang	85	Baik
	Cakar	90	Baik
	Serkop	45	Baik

	Cangkul	25	Cukup baik
	Sak	282	Cukup baik
	Sepeda motorroda tiga	3	Cukup baik
	Sabit	10	Baik
	Gerobak sampah	70	Cukup baik
	Drum truck	15(2014)	Baik
	Truck armrol	10(2014)	Baik
	Composer	100	Cukup baik
	Mesin cacah	2-3/TPS	Cukup baik

Sumber: Kabag DKP, 2014

(3) sumber daya financial, anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam mengimplementasikan program SBH. Sumber daya finansial pada tahun 2013 sebesar 218.404.041.

#### d. Disposisi

Pengelolaan program SBH di Kabupaten Sidoaro tentu saja tidak terlepas dari peran penting setiap pemangku kepentingan (*stakeholders*). *Stakeholder* yang terlibat dalam program SBH adalah (1) Pemerintah, Kewajiban pemerintah Kabupaten dalam hal ini DKP adalah menjaga, memelihara dan menyelenggarakan kegiatan pengelolaan lingkungan khususnya masalah sampah guna mewujudkan Kabupaten Sidoarjo yang bersih, nyaman, hijau dan teduh. Dalam program SBH, DKP bekerjasama dengan BLH dan DINKES serta Radar Surabaya.

(2) Swasta, Peran Swasta dalam pengimplementasian program SBH dapat dilihat dari adanya perjanjian kerjasama antara DKP dengan Radar Surabaya. Dalam perjanjian tersebut kewajiban Radar Surabaya adalah mempublikasikan program SBH melalui media elektronik ataupun media cetak. Selain itu kewajiban dari Radar Surabaya yang berperan sebagai EO dalam setiap acara *Road show*. Dengan adanya kerjasama tersebut diharapkan mampu memaksimalkan implementasi program SBH di Kabupaten Sidoarjo.

(3) Masyarakat, Peran serta masyarakat baik secara individual maupun kelembagaan terhadap implementasi program SBH sangat diharapkan. Masyarakat diharapkan sadar akan pentingnya pengelolaan lingkungan khususnya dalam menjaga lingkungan disekitarnya.

#### e. Program Kegiatan

Program Kegiatan untuk menciptakan wilayah yang hijau, bersih dan sehat melalui program Sidoarjo Bersih dan Hijau (Proposal

SBH 2010). (1) Pemilahan sampah basah dan kering. (2) Pemanfaatan lahan kosong untuk tanaman toga atau tanaman yang bermanfaat dengan menanam tanaman toga di setiap rumah minimal tiga jenis toga sebagai solusi hidup sehat dan hemat. (3) Penghijauan lingkungan (mengadakan gerakan tanaman 1000 pohon).

(4) Sanitasi lingkungan (membersihkan selokan secara berkala, fertilasi yang cukup di setiap rumah dan melakukan gerakan 3M, menguras, menutup, mengubur sehingga menghindari datangnya nyamuk *aedesdiagepti*. Adapun cara pengelolaan sampah sebagai berikut: Di daur ulang, Pengkomposan, Pengurangan sampah dengan 4R, *reduce, reuse, recyle, replace*.

#### f. Outcomes

Dampak dari adanya program SBH adalah masyarakat Sidoarjo menjadi mengerti dan memahami bagaimana mengelola sampah rumah tangga menjadi sesuatu yang bermanfaat. Hal ini dapat dilihat dari adanya Bank Sampah Mandiri di Desa Bolongdowo, yang mana bank sampah tersebut digunakan oleh masyarakat di sekitar desa untuk menabungkan hasil kerajinan olahan sampah non organik. Selain di desa Bolongdowo, Bank sampah juga disediakan oleh DKP Kabupaten Sidoarjo yang bertempat di Kantor DKP Sidoarjo. Dari hasil penjualan kerajinan sampah non organik dipergunakan untuk membangun taman, lapangan badminton, volley ball, tempat bermain anak-anak dan balai RW IV desa Bolongdowo, yang mana pembangunannya masih berlangsung sekitar 55%, pembangunan tersebut juga mendapatkan bantuan dari dana APBD sebesar 108.000.000.

#### 2. Kendala Implementasi Program SBH

##### a. Tidak Adanya Sinergi yang Baik antara DKP dan Dinas-Dinas yang Terkait dalam Pelaksanaan Program SBH .

DKP Kabupaten Sidoarjo sebagai dinas yang menaungi program SBH. DKP dalam mengimplementasikan program SBH juga mengajak dinas lain seperti BLH dan DINKES. Seiring berjalannya program SBH, BLH terkesan untuk tidak mau tau dan menyerahkan program ini seutuhnya kepada DKP. Kurangnya sinergi dan kerjasama yang baik antara dinas-dinas tersebut menyebabkan implementasi program SBH tidak berjalan secara maksimal.

##### b. Kurangnya Kesadaran dari Setiap Masyarakat tentang Pentingnya Menjaga Lingkungan.

Menurut UUD 23 tahun 1997 pasal 5 dapat ditafsirkan bahwa setiap manusia

tanpa kecuali berhak untuk menikmati/memanfaatkan lingkungan hidup, manusia juga mempunyai kewajiban untuk memelihara, mencegah, dan menanggulangi, sesuatu akibat dan penggunaan hak atas lingkungan hidupnya.

Berdasarkan UUD tersebut dijelaskan bahwa perlu adanya kesadaran dari setiap masyarakat untuk ikut menjaga dan melestarikan lingkungannya. Dengan demikian, kurangnya kesadaran dari masyarakat kabupaten Sidoarjo dalam menjaga lingkungannya, akan menjadi faktor penghambat dari proses implementasi program SBH, yang mana merupakan program pemerintah daerah kabupaten Sidoarjo dalam menjaga dan mengelola lingkungannya.

#### **c. Tidak Adanya Sanksi yang Tegas bagi Masyarakat yang Membuang Sampah Sembarangan.**

Untuk mengimplementasikan program SBH dengan baik dan efektif diperlukan berbagai dukungan yang nantinya akan mendukung keberhasilan program tersebut. Karena program SBH menekankan pada pengelolaan sampah, maka pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo perlu membuat aturan dan sanksi yang tegas bagi masyarakat yang membuang sampah disembarang tempat. Namun sampai saat ini, pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo belum memberikan sanksi bagi masyarakat yang membuang sampah disembarang tempat dan hal ini akan menjadi penghambat proses implementasi program SBH.

#### **d. Banyaknya Urbanisasi Masyarakat ke Kabupaten Sidoarjo.**

Di Kabupaten Sidoarjo, yang setiap tahunnya mengalami pertumbuhan penduduk sekitar hampir 7-8% akibat urbanisasi menimbulkan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan lingkungan. Permasalahan yang timbul akibat tingginya tingkat urbanisasi di

Kabupaten Sidoarjo menyebabkan banyaknya timbulan sampah yang sampai saat ini masih tidak mampu untuk diatasi oleh pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo. Semakin tingginya kaum urban yang menetap di Kabupaten Sidoarjo jelas potensi timbulan sampah akan semakin besar. Hal ini dapat menimbulkan berbagai persoalan yang lebih besar apabila tidak segera diselesaikan.

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi Program Sidoarjo Bersih dan Hijau yang Tertuang Dalam SK. Bupati No 188 Tentang Tim Sidoarjo Bersih dan Hijau, serta berbagai penjelasan berdasarkan kondisi riil yang terjadi di tempat penelitian, maka penulis menarik kesimpulan Implementasi program SBH dapat dilihat dari enam indikator yakni regulasi, sosialisasi, sumber daya, disposisi, program kegiatan dan *outcomes*. Hasil dari implementasi program SBH adalah mampu memberikan keterampilan dan pengetahuan baru kepada masyarakat Kabupaten Sidoarjo dalam mengelola sampah menjadi barang yang bernilai ekonomis dan bermanfaat. Namun, program SBH belum mampu mengatasi jumlah volume sampah di Kabupaten Sidoarjo.

Dalam pelaksanaan program SBH Kabupaten Sidoarjo juga mengalami berbagai hambatan, baik hambatan yang berasal dari dalam ataupun dari luar instansi pemerintah. Hambatan internal implementasi program SBH adalah tidak adanya sinergi yang baik antara dinas-dinas terkait dalam pelaksanaan program SBH, serta tidak adanya sanksi yang tegas bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Sedangkan faktor penghambat eksternal dalam implementasi program SBH adalah kurangnya kesadaran dari setiap masyarakat tentang pentingnya masalah lingkungan serta banyaknya tingkat urbanisasi masyarakat yang datang ke Kabupaten Sidoarjo.

---

#### **Daftar Pustaka**

- Abdul Wahab, Solichin. (1990) **Pengantar Analisis Kebijakan Negara**. Jakarta, Rineka Cipta.
- Azwar, S. (2007) **Metode Penelitian**. Yogyakarta, Pustaka Belajar.
- Berita, Sidoarjo. (2013). **Carut Marutnya Masalah Sampah di Sungai Perlu Perhatian Semua Pihak di Sidoarjo**. Diakses melalui <http://www.infosda.com/2013/06/12/> [diakses pada tanggal 02 Januari 2014].
- Miles, B. Matthew dan A. Michael Huberman. (1992) **Analisis Data Kualitatif**. (Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi). Jakarta, UI-Press.
- Moleong, Lexy J. (2006) **Metodologi Penelitian Kualitatif**. Edisi Revisi. Bandung,

P.T RemajaRosdakarya.

Sjamsudin Syamsiar Indradi. (2006) *Dasar – dasar dan teori Administrasi Publik*. Malang, Yayasan Pembangunan Nasional Kerjasama Dengan CV.SOFA Mandiri Dan Indonesia print Malang.

UUPLH No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta, Kementrian Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Jakarta, Kementrian Lingkungan Hidup.

Purwanto Agus,dkk. (2012)**Implementasi Kebijakan Publik**. Jogjakarta, Gava Media.

Zuhri, Fais. (2013). **Kepala DKP Sidoarjo tentang Kelola Sampah Berbasis Kawasan**. Diakses melalui <http://www.p2kp.org/> [diakses pada tanggal 01 Januari 2014].